



Sosialisasi dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

ANGGOTA Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan, kunci agar peraturan daerah bisa ditaati dengan baik adalah sosialisasi dan penegakan hukum.

Menurut Fokki, meskipun Perda Nomor 1 dan 2 Tahun 2020 tentang Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sudah disosialisasikan selama satu tahun, tidak menutup kemungkinan juru parkir tidak pa-

ham, Ia pun khawatir ketidakpahaman itu membuat tarif di kawasan II dan III ikut naik.

"Makanya Dishub (Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta) harus sosialisasi secara masif, supaya masyarakat tahu kalau kawasan II dan III tidak naik, dan juru parkir juga tidak asal menaikkan tarif. Tetapi harus juga diimbangi dengan penegakan proses hukum," katanya kepada *Tribun Jogja*, Minggu (26/7).

Menurut dia, dengan penerapan perda baru, penegakan hukum justru harus dikedepankan. Sebagai legislatif, pihaknya juga ambil bagian dalam bidang pengawasan. "Kuncinya dipenagakan hukum, harus lebih tegas. Pengawasan dari Dishub juga harus diperketat. Kami, juga akan melakukan pendampingan jika memang ada pelanggaran. Kami juga akan melakukan

● ke halaman 15

Sosialisasi dan Penegakan

● Sambungan Hal 9

sosialisasi juga," lanjutnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Oleh Yuhan. Menurut dia pengawasan dan penegakan hukum memang diperlukan, sebab tak jarang pelanggaran

terjadi.

"Jangan sampai tidak sesuai dengan aturan. Perda kan produk hukum yang berlaku, nah biasanya pada kenyataannya ada perbedaan. Minggu lalu saya parkir Rp10 ribu padahal tidak ada satu jam. Jika tarif progresif, paling tidak itu setara dengan 4 jam," ungkapnya.

"Makanya pengawasan ini penting, supaya tidak terjadi pelanggaran. Nah ketika

ada pelanggaran, penegakan hukum juga harus dilakukan," sambungnya.

Kesulitan menarifi

Sementara itu, Ketua Forum Pekerja Parkir Kota Yogyakarta, Ignatius Hanarto mengatakan petugas parkir memang kesulitan dalam menentukan tarif parkir, terutama tempat parkir yang menerapkan progresif.

"Selama ini kita hanya mengira-ira saja. Karena tidak

alat untuk mendeteksi. Jadi ya kami kira-kira pengunjung berapa lama parkirnya. Kalau pas banyak ya kita rata-rata saja," katanya.

Terkait kenaikan tarif, petugas parkir sudah mengetahui. Pihaknya pun telah melakukan sosialisasi kepada petugas parkir.

"Sudah tahu, tarif juga sudah kami sesuaikan. Sejak 1 Juli kemarin sudah diterapkan," tambahnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005